

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi bagian dari sekian banyak negara di dunia yang mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai suatu cita-cita pembangunan. Berbagai aspek masuk ke dalam indikator bagaimana SDGs dikatakan berhasil. Termasuk tujuan di dalamnya yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inovatif dan mampu mengentaskan kemiskinan. Dalam aspek perekonomian, hal ini tentu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS, perekonomian Indonesia terus bertumbuh. Namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mengindikasikan ratanya pembangunan ekonomi. Berbeda dengan negara maju yang mengidentikkan pembangunan ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB, negara-negara berkembang terutama Indonesia yang penduduknya heterogen menilai pembangunan ekonomi dari tingkat kesejahteraan yang merata melalui beragam indikator (BPS, 2016).

Secara sederhana pembangunan bisa diartikan berupa suatu usaha atau langkah-langkah untuk melakukan suatu perubahan menuju arah yang semakin baik dari sebelumnya. Di dalam langkah-langkah Pembangunan ini tentunya semua aspek di kehidupan masyarakat tercakup, seperti aspek ekonomi, budaya, politik dan juga sosial (rita setya Winarni, 2018). Sedangkan Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses perubahan suatu keadaan yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi secara kualitas yang akhirnya dapat tercapai sebuah kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan ekonomi, pada mulanya hanyalah suatu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Realitasnya, pada tahun 1960 sampai 1970-an, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh sejumlah negara berkembang tidak mampu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran bahkan lebih buruk. Fakta tersebut mendorong perubahan arah pembangunan, dimana pembangunan ekonomi lebih berfokus pada kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Target ini mengharuskan jika seluruh warna Indonesia agar dapat memiliki akses dan hak

atas setiap pelayanan sehingga dapat merasakan nikmat standar kelayakan hidup yang layak dan tidak sampai menuju kata miskin (Si'lang et al., n.d.).

Menurut Todaro (2002) sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusia adalah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan hakikat 10 pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, ini berarti pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai subjek (pelaku) maupun objek (tujuan) pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Menurut (Istikomah et al., 2014) Indikator seperti rata lama sekolah memiliki pengaruh terhadap pembangunan kualitas manusianya sebagai generasi penerus di masa depan. Seseorang yang diharuskan mempunyai pembelajaran tinggi dan wajib belajar 12 tahun agar nantinya mendapat pekerjaan yang layak seperti memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena saat ini para pencari kerja melihat tolak ukur seseorang dari kualitas pendidikannya.

Tingkat pengangguran terbuka, merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini juga memiliki pengaruh yang besar karena jika mereka belum juga segera menemukan pekerjaan yang diinginkan atau pekerjaannya tidak pasti maka akan berimbas kepada kemiskinan (Muslim, 2014).

Selanjutnya indikator persentase penduduk miskin Menurut (Lestari et al., 2017) kemiskinan bisa diartikan sebagai individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimal kebutuhan dasar hidup yang layak seperti makanan ataupun non makanan, biasanya hal ini ditandai dengan tingkat pendapatan yang rendah, jika hal ini terjadi maka akan memberikan dampak yang luar biasa, seperti mempengaruhi terhadap Kesehatan, Pendidikan, hilangnya pekerjaan dan bahkan merembet ke kriminalitas. Hal ini dapat terjadi karena tidak tercukupinya

kebutuhan seseorang membuat mereka mengambil jalan yang buruk agar dapat tercukupinya kebutuhan tidak peduli bagaimana caranya bahkan baik ataupun buruk. Maka dari itu dampak yang diberikan bisa fatal dan menjalar ke semua factor-faktor kehidupan.

Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pul sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataanya yang terjadi di Provinsi Gorontalo Indeks Pembangunan Manusia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonominya yang tidak stabil. Jika Indeks Pembangunan Manusia ini telah berhasil maju maka akan mengarah menuju Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Pembangunan inklusif adalah pembangunan dan pertumbuhan yang menghendaki adanya partisipasi dari semua pihak agar secara adil berperan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga ketika perekonomian tumbuh, maka akan diikuti oleh penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran (Prabandari & Santoso, 2018). Sedangkan Pertumbuhan yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada upaya menciptakan peluang ekonomi dan memastikan peluangnya diakses oleh semua pihak tanpa memandang latar belakang pihak-pihak yang terlibat. Pertumbuhan inklusif, seharusnya inheren berkelanjutan mengurangi perbedaan mendasar antara orang mampu dan tidak mampu. Pertumbuhan inklusif memberikan peluang supaya semua orang berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Negara, 2013).

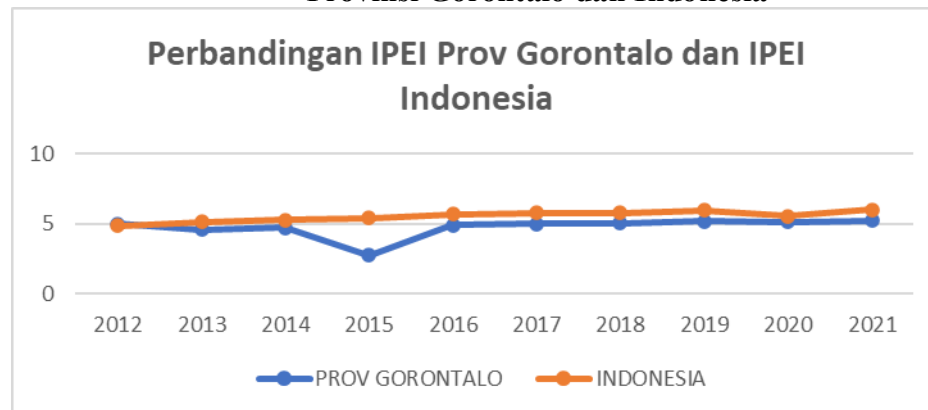
Provinsi Gorontalo merupakan sebuah provinsi yang berada di Indonesia yang letaknya berada di bagian utara Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo berdiri pada 5 Desember 2000 sekaligus menjadi pusat ekonomi dan perdagangan

terbesar di Kawasan Teluk Tomin. Provinsi Gorontalo merupakan Provinsi yang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusifnya dan masih dibawah rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia selama periode 2012-2021.

Sejalan dengan permasalahan ini, sehingga dilakukan perbandingan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif yang melalui indeks ini dapat di ketahui bagaimana kualitas pembangunan ekonomi inklusif yang telah di capai negara Indonesia itu sendiri dan daerah-daerah bagian sebagai suatu evaluasi keberhasilan pembangunan dengan menekankan pada prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman budaya daerah.



Grafik 1.1 Perbandingan Rata-Rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Gorontalo dan Indonesia



Sumber: BAPPENAS (2012-2021), diolah

Diketahui selama periode sepuluh tahun (2012-2021) rata-rata IPEI Provinsi Gorontalo selalu berada dibawah IPEI Indonesia. Pada tahun 2013 rata-rata IPEI Provinsi Gorontalo mengalami penurunan menjadi 4,58% padahal sebelumnya sebesar 4,97%. Hal ini berbanding terbalik dengan IPEI indonesia yang mengalami kenaikan dari 4,83% menjadi 5,11%. Pada tahun 2014 rata-rata IPEI dari dua wilayah tersebut mulai mengalami kenaikan secara bersama-sama dimana Provinsi Gorontalo sebesar 4,72% dan Indonesia 5,24%. Kondisi ini berbanding terbalik ketika memasuki tahun 2020 yang mengakibatkan kedua wilayah tersebut secara bersama-sama mengalami penurunan IPEI dengan angka sebesar 5,12% untuk Provinsi Gorontalo dan 5,54% untuk Indonesia kondisi penurunan ini terjadi dikarenakan adanya wabah covid-19 yang menimpa Indonesia sehingga memberikan banyak dampak tidak hanya dalam hal Kesehatan melainkan segala kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian mulai membaik ketika memasuki tahun 2021 yang secara langsung mengakibatkan kenaikan rata-rata IPEI. Tingkat rata-rata IPEI Provinsi Gorontalo sebesar 5,12% dan Indonesia sebesar 6,00%.

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Untuk itu peneliti ini akan membahas dan menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Gorontalo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, apakah variable rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Gorontalo

C. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini memiliki batas dengan tujuan agar hanya terfokus saja terhadap pembahasan variable yang diteliti agar tidak meluas ke pembahasan yang tidak penting. Adapun variable yang digunakan yakni rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Gorontalo.

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini sebagai pembuktian jika variable rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin secara langsung dapat mempengaruhi indeks pembangunan ekonomi inklusif, serta sebagai bukti keterangan dan sumbangan gagasan untuk pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan daerah guna meningkatnya indeks pembangunan ekonomi yang semakin inklusif.